



**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

## Tak Kenal Lelah Advokasi Rakyat Marhaen

**YOGYA (KR)** - Memasuki bulan kedua di tahun 2023, sejumlah warga Kota Yogya yang berlatar ekonomi menengah ke bawah yang tidak lagi memperoleh Kartu Menuju Sejahtera (KMS) merasa gelisah. Mereka kaget karena masih membutuhkan kebijakan afirmatif, salah satunya kuota sekolah negeri bagi putra-putrinya. Kondisi tersebut menjadi perhatian kalangan anggota dewan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto SIP mengaku dirinya tidak akan kenal lelah dalam memberikan advokasi rakyat Marhaen. Bersama para Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sebagai salah satu komunitas juang PDI Perjuangan, bergerak memberikan advokasi rakyat Marhaen," katanya.

Gerakan diawali di Kampung Terban pada 10 Februari lalu. Kemudian pekan lalu dilanjutkan di Kampung Danukusuman, tepatnya RW 05 Baciro. Advokasi lebih ditujukan dalam membantu warga miskin dalam mengunggah data agar dapat dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Peralnya masih banyak warga miskin yang kesulitan mendaftar mandiri karena terkendala akses teknologi. Apalagi

**ANTONIUS FOKKI ARDIYANTO SIP**  
Fraksi PDI Perjuangan



KR-Istimewa

berbagai intervensi dari pemerintah kini mengacu pada satu data nasional yakni DTKS, termasuk KMS yang diterbitkan Pemkot Yogya. Oleh karena itu, bagi warga miskin yang tidak masuk DTKS maka otomatis tidak akan diverifikasi sebagai penerima KMS.

Kendati demikian, Fokki yang juga Ketua Dewan Pimpinan Nasional Repdem, justru menemukan pemegang KMS namun tidak masuk dalam DTKS.

"Logikanya kan pemegang KMS harusnya masuk dalam DTKS. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dinas terkait harus mengecek, evaluasi serta introspeksi karena ditemukan juga warga yang masuk DTKS namun belum pernah memperoleh program bantuan," urainya.

Fokki juga menjelaskan, pendidikan adalah hak rakyat sehingga jangan terpatok pada KMS. Bagi yang KMS nya dicabut, Pemkot Yogya sudah mengulirkan program jaminan pendidikan daerah. Sehingga gerakan advokasi serta ajang edukasi tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan karena banyaknya permintaan dari wilayah untuk bisa melakukan sinkronisasi data berkaitan DTKS dan KMS.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005